

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali ialah bagian dari Indonesia. Pulau Bali dengan julukannya yakni pulau seribu pura dan pulau dewata. Bali dikenal sebagai pulau yang memiliki keindahan alam dan nilai budaya atau adat istiadat yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nilai budaya atau adat istiadat yang terdapat di Pulau Bali dianggap sebagai suatu keunikan, sehingga Pulau Bali banyak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara. Pulau Bali sering dijadikan sebagai tujuan wisata utama, bagi para wisatawan yang ingin berlibur di Indonesia. Kebanyakan penduduk di Bali bermata pencaharian sebagai petani. Ini disebabkan karena Bali adalah geografis agraris, jadinya bidang pertanian menjadi factor kunci yang memegang kehidupan penduduk di Bali.

Lembaga tradisional yang akan mewadahi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian merupakan lembaga yang berasal dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan menerapkan bentuk adat istiadat dan nilai budaya Bali yang sangat khas. Pemerintahan desa di Bali bisa dibagi dua, yakni desa dinas dan *pakraman*. Desa dinas dan desa adat memiliki fungsi, sistem atau struktur organisasi yang berbeda. Lembaga tradisional yang akan mewadahi kegiatan sosial, budaya dan

keagamaan khususnya bagi masyarakat Bali yang bekerja di sektor pertanian dikenal dengan nama *Subak*.

Subak berasal dari kata “suwak”. Dalam peraturan daerah Provinsi Bali No. 2/PD/DPRD/1972 bahwa *subak* merupakan suatu masyarakat hukum adat yang memiliki sifat sosio-agraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. *Subak* juga dapat dikatakan sebagai unsur tiang penting yang menopang secara efektif pembangunan pertanian dan desa di Bali. Pembangunan ini sudah dilaksanakan secara terus menerus.

Sistem *subak* dapat dikatakan sebagai suatu ciri khas sistem pertanian di Pulau Bali. Pitana (dalam Sunaryasa, 2002) menyebutkan bahwa *subak* di Bali memiliki lima ciri khas yaitu: (1) *Subak* merupakan suatu organisasi yang terdiri dari para petani yang akan mengelola air irigasi untuk para anggota – anggotanya. Organisasi *subak* memiliki beberapa orang pengurus dan peraturan (*awig-awig*) yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (2) *Subak* memiliki satu sumber air bersama, yaitu berupa bendungan (*empelan*), sungai, mata air maupun saluran utama suatu sistem irigasi. (3) *Subak* memiliki suatu areal persawahan. (4) *Subak* memiliki otonomi baik secara internal maupun eksternal. (5) *Subak* memiliki satu atau lebih dari satu pura yang berhubungan dengan persubakan, salah satu pura yang biasanya dimiliki oleh *subak* adalah Pura Bedugul atau Pura Ulun Carik. Hal tersebutlah yang membedakan sistem pertanian di Bali dengan sistem pertanian yang berada di luar Bali.

Sistem kebersamaan yang diterapkan oleh masyarakat Bali agar dapat membangun *subak* menjadi lebih baik lagi, diimplementasikan melalui kegiatan gotong royong dan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Segala

sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan pertanian akan disatukan, hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya suatu organisasi sosial yang dikenal dengan nama *subak*. *Subak* merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Warisan budaya yang berada di Bali, dikenal memiliki nilai religius yang dapat menarik minat seseorang untuk ingin mengetahui lebih lanjut. Nilai religius yang terdapat pada *subak* diimplementasikan melalui konsep *tri hita karana*. Konsep *tri hita karana* ini, merupakan salah satu penyebab *subak* di Bali diahkan jadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Penetapan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 2012 dengan label *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri hita karana Philosophy* (Lanskap budaya Bali: Sistem *Subak* sebagai Manifestasi Filosofi *Tri hita karana*).

Konsep *tri hita karana* dapat dijabarkan dalam tiga hubungan yaitu, sebagai berikut: Pertama, merupakan korelasi harmonis diantara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang disebut dengan *parahyangan* (tempat persembahyangan). Dapat dilihat bahwa setiap *subak* di Bali pasti memiliki Pura Bedugul (pura *subak*) yang merupakan unsur ketuhanan dalam *subak* itu sendiri. Kedua, ialah korelasi harmonis antara manusia dengan manusia yang disebut dengan *pawongan*, dimana *subak* memiliki beberapa anggota *subak* yang disebut sebagai *krama subak* yang akan mengadakan kegiatan rapat, menanam padi, dan gotong royong yang dilakukan secara bersama – sama. Ketiga, ialah korelasi yang harmonis antara manusia dengan alamnya (lingkungannya) yang disebut dengan *palemahan*. *Palemahan* berasal dari kata *lemah* yang memiliki arti tanah, bumi, atau wilayah. *Subak* sendiri mempunyai wilayah/ areal pertanian dengan beberapa batas alam tertentu seperti sungai, jalan,

pematang besar, desa, dan lain sebagainya. Penjagaan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan diyakini dapat menimbulkan suatu keselarasan dan keseimbangan.

Subak yang salah satunya menerapkan ajaran *tri hita karana* adalah *subak* Jatiluwih, yang mana dalam penjabarannya yaitu sebagai berikut: pertama yaitu *parahyangan*, *subak* Jatiluwih mengimplementasikan ajaran tersebut melalui pelaksanaan lima belas rentetan upacara yang dimulai dari upacara *mapag toya* hingga upacara *mantenin*. Kedua yaitu *pawongan*, *subak* Jatiluwih mengimplementasikan ajaran tersebut melalui pengadaan rapat yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan sebelum tanggal 10 yang dihadiri oleh pengurus *subak*. Ketiga yaitu *palemahan*, *subak* Jatiluwih mengimplementasikan ajaran tersebut melalui penjaga kebersihan sungai contohnya, yaitu dengan cara mengajak muda - mudi untuk ikut membersihkan saluran irigasi sawah, yang nantinya akan diisi dengan ikan, dengan begitu maka lingkungan, keselarasan, dan keseimbangan akan tetap terjaga.

Subak Jatiluwih telah ditetapkan sebagai *world heritage* oleh UNESCO. Dalam KOMPAS.com juga terdapat Pitana yang menyebutkan empat pokok penting yang menyebabkan *subak* Jatiluwih memperoleh predikat sebagai warisan budaya tak benda yaitu yang pertama *subak* Jatiluwih masih terbilang original dan asli, apabila dibandingkan dengan *subak* lainnya. Kedua, yang ditanam disini ialah padi local (beras merah) dan menjadi produsen utama beras merah dan telah menembus pasar internasional. Ketiga, secara estetika pemandangan *subak* Jatiluwih juga terbilang Indah. Keempat, *subak* Jatiluwih masih mengikuti aturan tradisional untuk melestarikan budayanya. Dengan begitu *subak* Jatiluwih juga

dijadikan sebagai sebuah desa wisata dari tahun 1993.

Subak Jatiluwih terdapat di Kabupaten Tabanan dan dengan geografis dataran tinggi ketinggiannya yakni 500 sampai 750 meter di atas permukaan laut dipenuhi persawahan (terasiring). Areal persawahan di Desa Jatiluwih 303,40 hektar unsur tanah dari pelapukan Gunung Batukaru sangat subur dan cocok untuk bertanam. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan telah terhimpun ke dalam organisasi *subak*. Saat ini anggota *subak* berjumlah 545 orang yang berasal dari tujuh *tempek* yaitu Tempek Uma Kayu, Tempek Gunung Sari, Tempek Telabah Gede, Tempek Besi Kalung, Tempek Kedamian, Tempek Uma Duwi, dan Tempek Kesambi.

Subak Jatiluwih dikenal memiliki keindahan alam yaitu berupa luasnya hamparan sawah yang bertingkat - tingkat dalam bentuk terasering, maka dari itu *subak* Jatiluwih dijadikan sebagai objek wisata yang berbasis pertanian (agrowisata). Utama, *et al.* (2019) menyatakan wisata agro atau agrowisata merupakan bisnis di bidang pertanian yang berfokus pada jasa ke konsumen. Bentuk jasa yang dimaksudkan berupa keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan pendidikan. Agrowisata juga dapat dikatakan sebagai pengembangan pariwisata dengan berbasis pertanian, dengan mengandalkan aktivitas pertanian seperti membajak sawah, menanam, dan memanen padi, yang mana hal tersebut dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Pemanfaatan hasil pertanian seperti beras, sayur, dan buah – buahan untuk memenuhi keperluan industri pariwisata seperti restoran dan villa di suatu daerah yang merupakan tujuan wisata. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari pengembangan agrowisata.

Subak Jatiluwih merupakan salah satu agrowisata yang berada di daerah

Tabanan. Berdasarkan hal tersebut dapat menyebabkan objek wisata Jatiluwih menjadi berkembang, disisi lain objek wisata Jatiluwih tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, melainkan telah dikenal hingga ke mancanegara. *Subak* Jatiluwih dapat dikenal hingga ke mancanegara sesudah *subak* Jatiluwih menjadi warisan budaya dunia. Menurut Widari (2015) bahwa sesudah *subak* Jatiluwih dijadikan warisan budaya dunia, menyebabkan pemerintah daerah membentuk badan tatakelola daya tarik wisata berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 tahun 2013. Peraturan tersebut diterbitkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD). Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut menyebabkan *subak* Jatiluwih memperoleh keuangan yang berasal dari pembagian hasil retribusi yang berasal dari DTW Jatiluwih, yang mana keuangan tersebut didapatkan semenjak tahun 2012.

Pada umumnya, *subak* memperoleh sumber dana yang berasal dari *peturunan* (iuran), denda, dan sumbangan pemerintah. Sumber dana tersebutlah yang menyebabkan *subak* Jatiluwih berbeda dengan *subak* lainnya. Perbedaan sumber dana tersebut berasal dari pembagian hasil retribusi. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 3 berisikan mengenai tempat rekreasi dan olahraga yang dijadikan sebagai objek retribusi, yang mana DTW Jatiluwih merupakan salah satu dari objek retribusi. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Menurut Darise (dalam Toduho, *et al*, 2014) bahwa redistribusi daerah untuk pembayaran bagi jasa yang tersedia dari pemerintah daerah guna enajadi kepentingan badan amupun pribadi. Pemungutan biaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan tersebut yang menyebabkan *subak* Jatiluwih memperoleh dana dari pembagian hasil retribusi. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari I Wayan Murdana yaitu selaku bendahara *subak* yang mengatakan bahwa:

“Subak driki polih dana saking DTW Jatiluwih niki (subak di sini memperoleh keuangan yang berasal dari DTW Jatiluwih atas pembagian hasil retribusi) sebesar 21% dan keuangan itu kami dapatkan setiap bulan. Karena subak Jatiluwih ditetapkan sebagai daya tarik wisata maka kami sebagai pengurus subak sudah tidak pernah lagi meminta iuran (peturunan) kepada krama subak. Jadi sepenuhnya keuangan subak Jatiluwih bersumber dari pembagian hasil retribusi yang berasal dari DTW Jatiluwih dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah provinsi Bali”.

Pengelolaan dana yang bersumber dari hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus yang dikelola oleh *subak* Jatiluwih juga memiliki suatu keunikan dibandingkan dengan pengelolaan keuangan konvensional, yang mana dalam pengelolaan keuangan tersebut, *subak* Jatiluwih sangat mempertahankan nilai *tri hita karana*. Sehingga pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh *subak* Jatiluwih berlandaskan pada ajaran *tri hita karana*. Adapun penerapan dari nilai *tri hita karana* tersebut, tercermin dari adanya anggaran serta kegiatan yang difokuskan pada unsur *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dengan adanya implementasi tersebut mampu memunculkan adanya kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan pada *subak* Jatiluwih, baik itu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, *krama subak* maupun alam semesta. Oleh sebab itu penelitian mengenai pengelolaan keuangan pada *subak* menjadi sangat penting

dan menarik untuk dilakukan.

Adanya dana yang bersumber dari pihak eksternal baik itu dari hasil retribusi maupun bantuan keuangan khusus pada *subak* Jatiluwih menyebabkan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *subak* Jatiluwih menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan *subak* yang lainnya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yang melewati pelaporan pemakaian anggaran, tetapi lebih focus pada tanggung jawab dari sebuah mandat. Menurut Masdiasmo (dalam Harnovinsah, *et al*, 2020) menjelaskan akuntansi publik ialah keharusan penanggung jawab (*agent*) untuk terbuka akan informasi dan tanggung jawab pada pemilik amanah (*principal*). Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas ialah keharusan pertanggung jawaban dan pengertian tentang pekerjaan yang dilakukan individu, badan hukum, pimpinan organisasi kepada pihak yang seharusnya diberikan pertanggung jawaban. Pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yaitu pihak pariwisata, pemerintah dan anggota *subak* (*krama subak*).

Anggota *subak* (*krama subak*) juga memiliki hak yang sama dengan dinas pariwisata dan pemerintah dalam meminta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan akan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak pemberi dana dan diungkapkan secara transparan kepada pihak penerima dana. *Subak* Jatiluwih hanya memperoleh dana dari pihak eksternal saja, yang mengartikan bahwa tanggung jawab pengurus *subak* menjadi lebih besar. Namun dalam pengelolaan keuangan tersebut masih menggunakan dua sistem pencatatan yang berbeda.

Pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus tempek masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi. Padahal dana yang diperoleh dari pemerintah provinsi Bali dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) digunakan oleh masing – masing tempek, yang mana setiap tempek akan mendapatkan dana tersebut setiap tujuh tahun sekali. Kedua, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus *subak* sudah menggunakan sistem modern dan sudah sesuai dengan standar akuntansi meskipun masih sederhana. Pencatatan sudah menggunakan sistem modern karena dana yang dikelola cukup besar, serta pertanggungjawabannya tidak hanya kepada anggota *subak* saja melainkan juga kepada dinas pariwisata melalui daya tarik wisata (DTW). Sehingga dengan begitu, maka akan memerlukan pencatatan yang lebih terperinci.

Tempek yang memperoleh dana dari pemerintah, seharusnya bisa membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Tetapi dalam kenyataannya pengurus tempek masih kesulitan pada proses pembuatan laporan keuangan karena masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh bendahara tempek. Selain itu, tempek juga memperoleh dana dari *subak* sebesar lima persen setiap bulannya. Jumlah dana yang diterima oleh tempek tergantung dari besar – kecilnya atas pembagian hasil retribusi. Dalam hal ini pengurus tempek hanya membuat laporan keuangan secara manual karena hanya dipertanggungjawabkan kepada pengurus *subak* dan anggota tempek yang sebagian besar tidak terlalu mengerti dengan laporan keuangan atau dapat dikatakan kesulitan dalam membaca laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan digunakan sebagai pedoman pada alur yang kaitannya ada dengan pemberian laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi

hanya ada satu laporan keuangan pada suatu organisasi. Namun dalam organisasi *subak* Jatiluwih menggunakan dua sistem pencatatan dalam laporan keuangannya, dimana *subak* menggunakan sistem pencatatan modern dan anggota tempok masih menggunakan sistem pencatatan manual. Dengan sistem pencatatan yang berbeda tersebut menyebabkan pihak pemakai laporan keuangan menjadi kebingungan karena harus dapat membandingkan dan memahami kedua laporan dari sistem pencatatan yang berbeda tersebut.

Penyusunan laporan keuangan selain harus menggunakan satu pencatatan, juga harus jelas dalam pelaporan keuangan kepada pemberi dana. Laporan keuangan tujuannya mmeberi informasi mengenai kinerja keuangan keseluruhan dalam suatu organisasi, yang mana informasi tersebut akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan pada rangka mengambil kebijakan ekonomi dan emmeperlihatkan pertanggungjawaban (*stewardship*) atas penggunaan dana yang telah dipercaya kepada seluruh anggota organisasi. Menurut Cintokowati (dalam Korompis, 2014) bahwa tujuan laporan ekuangan bagi pihak yang berkepentingan ialah memberikan gambaran keadaan keuangan organisasi, untuk pihak luar guna mengetahui perkembangan organisasi dan dana yang dipakai dipergunakan sebaik mungkin.

Penyusunan laporan keuangan pada organisasi *subak* sudah berbasis sistem informasi akuntansi. Menurut Kurniawan & Parapaga (dalam Firdaus & Yulianto, 2018) bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Dalam organisasi *subak* Jatiluwih sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, yang mana dalam proses

penyusunan atau perancangan laporan keuangan sudah menggunakan komputer. Walaupun dalam tempek masih menggunakan sistem manual tetapi pengurus *subak* sudah mampu menggunakan elektronik (komputer) yang menggunakan perangkat lunak aplikasi. Dengan menggunakan perangkat lunak tersebut maka dalam proses pencarian data akan lebih mudah dan pembuatan laporan juga akan lebih cepat sehingga akan menghasilkan data yang akurat.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian yang mendukung dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh oleh Darmada (2016) menyatakan pengelolaan keuangan *subak* dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengelolaan keuangan internal dan pengelolaan keuangan eksternal. Pengelolaan dana internal dalam upacara *Ngusaba Desa* dilakukan secara sederhana, pengurus *subak* hanya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan cara mengumumkan pemasukan yang diperoleh serta rincian biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan upacara. Sementara, pengelolaan dana eksternal yang berasal dari Hibah Gubernur Bali dikelola dengan sistem yang lebih baik dan sesuai prosedur laporan pertanggungjawaban dari Lurah. Laporan yang dibuat bersifat lengkap, mulai dari dengan transaksi terkait, jumlah pengeluaran, bukti transaksi, absensi krama *subak*, hingga dokumen kegiatan yang dilakukan.

Penelitian lain yang dilakukan Marleni (2019) menyatakan pencatatan dalam pengelolaan keuangan di *Subak Gebang Gading Atas* dibagi menjadi dua sistem yang berbeda. Pertama penyajian laporan pertanggungjawaban sumber pendapatan internal dibuat lebih sederhana. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola sedikit dan pertanggungjawaban hanya kepada *krama subak* yang sebagian besar tidak terlalu memperdulikan pencatatan tersebut. Kedua dicatat

dengan sistem modern dan sudah sesuai dengan standar akuntansi meskipun masih sederhana. Pencatatan dengan menggunakan sistem modern karena dana yang dikelola cukup besar, sehingga memerlukan pencatatan yang lebih terperinci. Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan Kustina, *et al.* (2019) mengungkapkan pengelolaan keuangan *Subak Teba*, dipertanggungjawabkan kepada seluruh *krama subak* secara terbuka pada kegiatan rapat rutin (*sangkepan*). Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *subak* akan segera dilaksanakan setelah suatu kegiatan berlangsung.

Subak Jatiluwih dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Adapun alasan dilakukannya penelitian pada organisasi *Subak* Jatiluwih yaitu karena *subak* memperoleh sumber pendanaan yang berbeda dengan *subak* lainnya. *Subak* Jatiluwih memperoleh pendanaan yang bersumber dari pembagian hasil retribusi yang berasal dari dinas pariwisata melalui daya tarik wisata (DTW). Selain itu akuntabilitas laporan keuangan yang diinginkan oleh *krama subak* dengan dinas pariwisata dan pemerintah sedikit berbeda. Jumlah dana yang diperoleh oleh *subak* Jatiluwih dalam jumlah yang cukup besar, dengan keidentikkan kesederhanaannya *subak* Jatiluwih dapat mengelola keuangan yang berlandaskan dengan *tri hita karana* dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan *subak* yang diciptakan oleh anggota *subak* (*karma subak*).

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan memaknai proses pengelolaan keuangan yang berlandaskan *tri hita karana* dan pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis sistem informasi akuntansi. Dalam hal membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh *krama subak* menjunjung tinggi konsep dan nilai – nilai agama hindu dan memupuk rasa

saling percaya dengan sesama *krama subak* (Widnyani, 2015). Marleni (2019) telah meneliti mengenai pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari pihak internal dengan konsep kearifan lokal. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini akan meneliti mengenai pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber pada pihak eksternal berbasis sistem informasi akuntansi pada *Subak Jatiluwih*, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dengan mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan yang Bersumber dari Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Sistem Informasi Akuntansi Pada *Subak Jatiluwih*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pengelolaan keuangan pada suatu organisasi baik itu dalam lingkup besar maupun kecil tentu memerlukan sumber keuangan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. *Subak Jatiluwih* merupakan salah satu organisasi yang memerlukan dana untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, yang mana *subak Jatiluwih* mendapatkan sumber pendanaan dari pembagian hasil retribusi yang berasal dari DTW dan bantuan keuangan khusus yang berasal dari pemerintah provinsi Bali. Dengan begitu maka dalam pengelolaan keuangan tersebut diperlukan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi, karena memperoleh sumber dana dari pihak eksternal yang menyebabkan pertanggungjawabannya menjadi lebih besar. Tetapi dalam kenyataannya pada organisasi *subak* ini masih menggunakan dua sistem pencatatan, yang mana *tempek* masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi. Sedangkan *subak* sudah dapat melakukan pencatatan menggunakan sistem modern dan sudah

berbasis sistem informasi akuntansi. Dengan hal tersebut maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan standar akuntansi karena belum sesuai dengan prinsip administrasi yang benar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi permasalahan agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, yang berfokus pada perbedaan sumber dana yang berasal dari pembagian hasil retribusi dengan bantuan keuangan khusus dan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi akuntansi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan *Subak Jatiluwih* yang bersumber dari hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus berlandaskan *Tri hita karana*?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan *Subak Jatiluwih* yang bersumber dari hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus berbasis sistem informasi akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan *Subak* Jatiluwih yang bersumber dari hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus berlandaskan *Tri hita karana*.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan *Subak* Jatiluwih yang bersumber dari hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus berbasis sistem informasi akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan pemahaman dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menerapkan ilmunya yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi *Subak*

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan *subak* mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan akuntabilitas atau

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

3. Bagi Undiksha Singaraja

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan ilmiah dan referensi di perpustakaan, selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai perbandingan bagi para mahasiswa lainnya dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan akuntabilitas.

